

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Perkembangan dinasti politik Atut di Provinsi Banten tidak lepas dari peran dan ketokohan ayahnya, Chasan Sohib. Kemenangan Atut pada Pilkada pertama kali saat itu membawa keberhasilan selanjutnya dengan Pilkada yang diikuti oleh keluarganya membawa kemenangan. Namun, pada Tahun 2013 terjadi pergolakan di dalam dinasti politik Atut, di mana Atut dan Wawan menjadi tersangka kasus korupsi. Akan tetapi, dinasti politik Atut masih dapat tumbuh subur dan semakin masif dengan kemenangan keluarga Atut di Pilkada berikutnya. Adapun terdapat tiga faktor yang menyebabkan dinasti politik Atut tetap bertahan ialah sebagai berikut.

Pertama, peran dan ketokohan *local strongman* ayah Atut, Tubagus Chasan Sohib, di mana ia menempatkan Atut pada Pemilihan Wakil Gubernur Banten pada Tahun 2001. Naiknya Atut menjadi Wakil Gubernur Banten menjadi awal berkembangnya dinasti politik Atut dalam ranah politik dan memusatkan kekuasaan pada Chasan Sohib. Kedua, Jejaring kekuasaan keluarga Atut. Dari sinilah kemudian dinasti politik Atut tetap bertahan setelah Atut menjadi tersangka kasus korupsi. Ketiga, yang terakhir adalah partisipasi politik masyarakat yang rendah. Partisipasi politik masyarakat Banten yang diikuti oleh kemenangan keluarga Atut selalu di bawah 65% dalam setiap perhelatan Pilkada.

Rendahnya partisipasi masyarakat Banten menjadi salah satu faktor penyebab bertahannya dinasti politik Atut di Banten. Hal ini dikarenakan rendahnya

partisipasi masyarakat Banten berarti mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat di dalam politik adalah minim. Sebab, fondasi utama dalam membangun demokrasi lokal adalah adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi lokal yang dilihat dari empat hal untuk menjelaskan kematangan demokrasi lokal di Banten

Pertama, Partisipasi politik. Kualitas partisipasi pemilih pada perhelatan Pilkada di Banten yang dimenangi oleh paslon dari keluarga Ratu Atut sesungguhnya bersifat rendah dengan minimnya pengetahuan masyarakat sehingga menguatkan dinasti tetap bertahan. Kedua, musyawarah. Mayoritas masyarakat di Provinsi Banten mengatakan bahwa musyawarah tidak terjalin di dalam masyarakat, sehingga hal ini mengakibatkan langgengnya dinasti politik Atut di Banten dengan jejaringnya yang kuat.

Ketiga, pendidikan politik. Minimnya pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik di Banten mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pemahaman/pengetahuan yang cukup mengenai politik, contohnya di daerah kabupaten dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Keempat, pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana utama di Provinsi Banten, terutama jalan perbatasan yang menghubungkan beberapa daerah, akan tetapi kondisinya sangat tidak layak atau buruk untuk digunakan. Sehingga, hal ini mencerminkan dengan pemerintah yang masih belum menjalankan perannya dengan baik, sehingga kesejahteraan masyarakat belum terpenuhi.

Selain keempat hal tersebut, peneliti juga menemukan bahwa teori Timothy mengenai demokrasi lokal dapat dikembangkan, yakni pertama, implikasinya terhadap pelebagaan partai politik (Golkar). Dampak buruk praktik dinasti politik pada aspek pelebagaan partai politik antara lain ditandai oleh lemahnya partai politik dalam mengekspresikan komitmen-komitmen ideologis dan karakteristik institusionalnya, rendahnya keberanian partai politik untuk mempromosikan kader-kader terbaiknya dalam kontestasi pilkada, dan gagalnya partai politik dalam membangun dan mengembangkan tradisi berdemokrasi yang terbuka, *fair* dan akuntabel di dalam tubuhnya sendiri.

Kedua, implikasinya terhadap persaingan antar kandidat. dampak buruk praktik dinasti politik pada aspek persaingan antar pasangan kandidat adalah adanya ketidakseimbangan dan ketidakadilan kompetisi sebagai akibat dari dominasi tidak sehat dari dinasti yang mengkooptasi dan mengendalikan birokrasi dan elemen-elemen masyarakat untuk memenangkan pasangan dari keluarga dinasti.

Ketiga, implikasinya terhadap budaya masyarakat dalam memilih. Dampak buruk dinasti politik terhadap masyarakat adalah masyarakat yang semakin masif akan praktik *money politic* yang menjadi salah satu alasan dinasti politik terus menang. Selain itu, masyarakat mulai mengalami kejenuhan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah sehingga masyarakat menjadi apatis (*apriori*), di mana tidak memiliki ketertarikan terhadap politik karena kejenuhan/ketidakpercayaan tersebut.

## 6.2 Saran

Perkembangan dinasti politik Atut di Banten bagaikan tidak memiliki celah sedikitpun. Bahkan, saat Atut dan adiknya, Wawan menjadi tersangka kasus korupsi, dinasti politik Atut masih dapat melebarkan sayapnya dengan kemenangan yang diraih oleh keluarga Atut pada tingkat eksekutif dan juga legislatif. Penelitian ini telah menjelaskan faktor penyebab dinasti politik Atut masih masih mendominasi di dalam perpolitikan di Banten setelah Atut dan Wawan menjadi tersangka kasus korupsi dan implikasinya terhadap kematangan demokrasi lokal di Banten dari tumbuh suburnya dinasti politik Atut. Adapun yang menjadi kelemahan di dalam penelitian ini adalah peneliti tidak detail menjelaskan kasus korupsi yang berada di lingkaran keluarga dinasti Atut. Sebab, dapat dikatakan korupsi di keluarga dinasti lebih mudah dilakukan dengan adanya keterlibatan keluarga, dan sulit diungkap karena saling menutupi keterlibatannya.

Saran untuk penelitian selanjutnya dan melengkapi kelemahan penelitian ini adalah perlu dilakukannya penelitian yang memfokuskan pada kasus korupsi yang terjadi pada lingkaran keluarga dinasti, terutama dalam kasus dinasti politik Atut di Banten. Selain itu, perlu adanya penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan keterlibatan masyarakat di dalam politik, terutama dalam pelaksanaan Pilkada dan minimnya partisipasi politik masyarakat yang diikuti oleh keluarga Atut. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif akan menjelaskan lebih mendetail demokrasi lokal di Provinsi Banten dengan menggunakan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk menjelaskan minimnya partisipasi politik masyarakat di Banten dengan cakupan masyarakat yang lebih luas.